

Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama

Abbas Langaji

ABSTRACT

The reality shows that the internal conflict among religion communities in Indonesia never can be overcome comprehensively. Even it increases year by year. One main causal factors of the conflict is the religious communities are not ready to live in multi religious society, which is included in theological issues. At the same time, most of society especially at the grassroot society, only sees the religious flows from the theological perspective. Therefore, their view becomes truth claim, then they see all the other religious flows or out of their mainstream is judged as deviant sect. This reality is getting worse because of fragmentation of religious authority which is widely spread nowadays.

The appearance and the development of many fragment religious flows is one of the main problems from religious, society and statecraft perspectives. It is because fragment religious flow is not only theological issues but also included other domain such as politics.

Currently, the efforts are focused on explaining fragment religious flows from social science approaches. The social sciences approaches are not only explain how a fragment religious flow appeared and developed but also can explain how to overcome religious conflict in the communities. In this case, The Religion colleges have important roles.

In relation to the increasing of educational level of community, which is influenced by the role of religion colleges. The religion colleges support the civil society approach with universal values which existed in all religions such as democracy, tolerance, egalitarianism spirits, that is why the approaches with social science basics are important to be intensified in understanding and responding towards the fragment religious flows phenomenon.

This paper explains about the fragment religious flows from the sociological perspectives and initiates the strategic roles of religion colleges in solving the problem of developed religious conflicts.

sebaliknya semua aliran yang dipandang tidak sejalan dengan kebenaran agama karenanya dicap sesat. Pendekatan teologis ini bukan tidak ada kelemahannya, antara lain akan memicu munculnya kecenderungan *judgement* (penghakiman); menyebut suatu aliran atau ajaran sebagai “sesat” sudah sendirinya merupakan penghakiman!

Penyebutan “aliran sempalan” terhadap komunitas penganut aliran keagamaan tertentu yang dianggap “aneh” atau “menyimpang” dari aqidah, ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat bukan tanpa masalah. Salah satu persoalan yang muncul sebagai konsekuensi dan implikasi sosiologis penyebutan aliran “sempalan” atau “sektarian” terhadap suatu komunitas religius adalah bahwa istilah “sempalan” atau “sektarian” mengandung konotasi negatif, sebab merupakan suatu protes terhadap pemisahan diri dari mayoritas sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme. Persoalannya kemudian adalah penyebutan aliran sempalan sebagai aliran yang menyimpang atau memisahkan diri dari satu aliran yang dipandang sebagai ortodoksi atau aliran induk (*mainstream*)nya, maka ortodoksi yang mana bisa dijadikan tolok ukur untuk menetapkan penyimpangannya, karena “benar” atau “sesat” merupakan suatu hal yang relatif yang karenanya masih perlu didiskusikan bahkan diperdebatkan. Dalam diskusi atau perdebatan tentang aliran yang benar dan aliran yang sesat inilah akan muncul “aliran sesat versi siapa”.

Deskripsi dinamika aliran keagamaan dengan pendekatan sosiologis mengandung relevansi yang tinggi bagi Pemerintah, agar respon terhadap aliran-aliran keagamaan sempalan dapat dilakukan secara tepat dan sejalan dengan fungsi pemerintah sebagai pengayom agama yang melindungi keyakinan agama setiap warganya. Pemahaman aliran keagamaan dengan pendekatan sosiologis ini juga akan membawa implikasi pada sikap pemerintah dan masyarakat muslim yang harus lebih mengutamakan pendekatan persuasif sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat.

II. AGAMA DAN MUNCULNYA SEKTE-SEKTE

Setiap agama mengandung aspek ajaran yang dianggap suci oleh penganutnya, yang dengannya nilai-nilai agama senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama kemudian dijadikan acuan normatif dalam perilaku keseharian, baik individu maupun kelompok. Pada saat yang sama, keragaman latarbelakang pendidikan,

Budaya, 1999), h. 243; lihat juga “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya” dalam Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah* (Ed. I. Cet.I : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 209.

Karena di Indonesia teologi yang dianut oleh mayoritas muslim adalah teologi *ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah*, maka dengan sendirinya teologi yang tidak sesuai dengannya dicap sebagai sesat. Misalnya kasus Syi'ah, boleh jadi karena mayoritas --untuk tidak menyebut semua-- pengurus MUI berteologi *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, maka keluarlah fatwa yang berisi himbauan kepada umat Islam di Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham Syi'ah tersebut. Lihat: Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa MUI*, h. 95; M Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law*, h. 138-140.

6. Sikap bermusuhan dengan komunitas lain di luar kelompoknya.³⁷²

Dari rumusan-rumusan tentang ciri-ciri dan karakteristik sekte yang dikemukakan di atas. Maka sejumlah komunitas keagamaan yang berkembang di Indonesia dapat dikategorikan sebagai aliran sempalan atau sekte sektarian. Hal tersebut didasarkan pada indikasi yang ditemukan di dalamnya berupa:

- a. Keberadaannya merupakan suatu komunitas kecil, yaitu para penganut dari suatu ajaran agama yang ‘memisahkan diri.’ Keanggotaannya ditinjau dari aspek ekonomi, pendidikan dan status sosial secara umum adalah warga dari kelas rendahan. Hubungan keanggotaan antara mereka dibina secara sukarela.
- b. Merupakan suatu sistem ajaran yang menyimpang dari ajaran ‘induk’nya. Dari sistem ajaran tersebut muncul ‘kecenderungan klaim kebenaran oleh penggagas dan pengikutnya. Dengan sistem ajaran itu juga para pengikutnya menunjukkan sikap eksklusif, baik dalam pemahaman maupun dalam pengamalannya.
- c. Adanya pola-pola peribadatan yang didasarkan atas sistem ajaran yang dianutnya yang berbeda dari pola ajaran induknya.
- d. Adanya sikap penolakan terhadap otoritas individu maupun otoritas institusi terhadap interpretasi ajaran agama.

III. LATAR BELAKANG DAN MUNCUL BERKEMBANGNYA ALIRAN KEAGAMAAN DALAM ISLAM

Dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologis, berkembang beragam pendapat tentang latar belakang muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut.³⁷³

³⁷² Uraian saling melengkapi, lihat : Stephen K. Sanderson, *Macrosociology*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul *Makro Sosiologi*, (Ed. II. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), h. 91-92; Michael S. Northcott, “Sociological Approach” dalam Peter Connolly (Ed.), *Approaches to the Study of Religion* (London: Cassel, 1999), h. 210; Keith A. Roberts, *Religion in Sociological Perspective* (Canada: Thomson Wadsworth, 2004), h. 185. Tentang tipologi sekte, lihat misalnya: Bryan Wilson, “A Typology of Sects” dalam Roland Robertson *Sociology of Religion: Selected Readings* (Victoria-Australia: Penguin Books, 1978), h. 364-370.

³⁷³ Sebagai perbandingan analisa sosiologis muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan dalam Islam ini, sejumlah ulama mengemukakan analisa historis. Uraian selengkapnya, lihat misalnya: Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.th), h. 1-9; M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 128-130; selain itu, sejumlah ulama juga mengembangkan teori konspirasi, yang menganggap bahwa balik penyebaran aliran-aliran keagamaan di dalam Islam terjadi suatu konspirasi ideologis teologi. Hal ini terbukti pada kasus-kasus perkembangan aliran keagamaan di Mesir dan India-Pakistan pada abad kesembilan belas hingga abad kedua puluh. Lihat misalnya, Mustafa Muhammad A’zami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1992), I:21-70; Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition* (Cambridge University Press, 1996), *passim*.

Barat dan pengaruh modernisasi, dengan menempatkan Islam sebagai ideologi yang unggul atas ideologi apapun.³⁸⁰

Adapun tipologi aliran keagamaan atau gerakan keagamaan oleh para sosiologi diklasifikasi menjadi tiga, yaitu , yaitu *endogenous religious movement*, *exogenous religious movement* menunjuk pada usaha-usaha mengubah karakteristik internal agama, dengan berusaha menghidupkan organisasi-organisasi keagamaan. Tipe kedua ini sangat mementingkan aspek survivalitas, kehidupan ekonomi, status, dan ideologi, agar organisasi agama dapat dijamin tetap bertahan dalam keseimbangan atau harmonis dengan lingkungannya. *Generative religious movement*, adalah gerakan keagamaan yang berusaha mengubah satu atau beberapa aspek ajaran agama, hingga terbentuknya satu agama baru.³⁸¹

A. Aliran keagamaan: sebuah gejala fragmentasi otoritas keagamaan

Dalam studi Islam, dikenal aksioma bahwa agama Islam dan al-Qur'an adalah *interpretable*. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa tidak semua orang memiliki otoritas menafsirkan al-Qur'an atau mengemukakan pemikiran dan pendapatnya tentang Islam dan al-Qur'an, kecuali orang-orang yang memenuhi syarat dan kualifikasi keilmuan tertentu. Seiring perkembangan zaman, otoritas tersebut telah terfragmentasi dengan munculnya sikap segelintir orang yang berprinsip bahwa interpretasi Islam tidak boleh menjadi monopoli kalangan tertentu; siapa saja berhak menafsirkan al-Qur'an serta mengemukakan dan atau menyebarkan pemikirannya tentang Islam tanpa terbelenggu oleh struktur keilmuan yang kompleks.

Fragmentasi otoritas merupakan suatu kenyataan yang tidak terhindarkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena pemikiran seseorang dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya, disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman-pengalaman, temuan ilmiah yang berkembang di masanya, kondisi sosial ekonomi dan politik di zaman dia hadir, mazhab fiqhi serta kecenderungan teologi yang dianutnya, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari fragmentasi otoritas ini adalah munculnya mufassir-mufassir baru yang dalam banyak hal penafsiran yang dikemukakannya berbeda dengan mufassir pendahulunya ataupun dengan generasi yang datang sesudahnya. Fragmentasi otoritas ini bukan terbatas hanya pada tafsir al-Qur'an, melainkan juga melebar kepada aspek ajaran agama yang lain, termasuk di dalamnya Hadis. Hal initerlihat pada munculnya sejumlah mazhab fiqhi, aliran teologi, dan lain-lain.

³⁸⁰ Imam Thalhah dan Abdul Aziz, "Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Kajian Awal" dalam Abdul Azis, dkk. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaud, 1989), h. 15-19.

³⁸¹ Lihat, Jeffrey K. Hadden, "Religious Movements" dalam Edgar F. Borgatta dan Rhonda J. V. Montgomery, *Encyclopedia of sociology*, Vol. IV, (USA: MacMillan Reference, 2000), h. 2364-2365.

Sebagian besar pengikut aliran keagamaan belum memahami betul aspek dan dimensi agama. Hal ini bisa diamati berbagai dimensi agama,³⁸⁶ ada ketidakparalelan antara dimensi pengetahuan agama dan dimensi pengamalan. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain karena pengetahuan mengenai satu keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

Kondisi keterbelakangan pendidikan khususnya pendidikan agama ini diperparah lagi dengan masih rendahnya peran dan penurunan kredibilitas pemuka agama. Pada dekade 1980-an hingga sekarang terjadi pergeseran rasa simpati dan penghormatan sosial yang diberikan kepada tokoh/pemuka agama serta perubahan persepsi masyarakat tentang keberadaan institusi agama. Sejumlah warga masyarakat muslim memandang peran dan fungsi tokoh agama tidak lagi terlalu penting dalam proses kepemimpinan masyarakat, pemuka agama dipandang bukan sebagai pengambil keputusan dominan masyarakat. Pemuka agama hanya dipersepsi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian yang sempit, misalnya mengurus kegiatan ibadah rutin dan penyuluhan agama, misalnya khotbah, ceramah, membaca do'a dalam kegiatan tertentu, dan sebagainya. Posisi tokoh agama yang demikian berdampak pada tingkat penerimaan derajat ketokohan.

Penurunan kredibilitas tokoh agama di mata masyarakat tersebut lebih didasarkan pada persepsi dan pengamatan masyarakat terhadap perilaku keseharian para tokoh yang selalu dikaitkan dengan kesesuaian antara pengetahuan dan wawasan keagamaannya dengan perbuatan dan kehidupan keseharian mereka. Kenyataan ini tergambar pada pernyataan yang bernada kecewa terhadap tokoh agama dan institusi keagamaan dari salah seorang anggota masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi tokoh agama sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu, sekarang tidak ada lagi pengaruh tokoh agama dalam masyarakat. Dulu, setiap perkataan ulama selalu didengar dan dituruti, karena masyarakat melihat dengan mata kepala bahwa apa yang mereka katakan seperti itu juga yang mereka laksanakan, hidupnya bersahaja. Dulu orang lebih hormat kepada ulama daripada pemerintah, tapi dewasa ini ulama banyak yang hanya mengikuti kemauan pemerintah, menyampaikan dakwah sesuai kepentingan organisasinya, kehidupannya juga cenderung materialistis, bahkan ada sejumlah *parewa syara'* yang justru tidak memahami seluk beluk agama yang menjadi tugasnya.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kredibilitas dan ketokohan ulama sudah bergeser. Pergeseran ketokohan tersebut dalam banyak kasus disebabkan

³⁸⁶ Tentang dimensi-dimensi keagamaan, lihat R. Stark dan C. Y. Glock, "Dimensions of Religious Commitment" dalam Roland Robertson (Ed.) "Sociology of Religion", (Middlesex-England: Penguin Books Ltd., 1978), h. 256-257; bandingkan: Tim Curry, Robert Jiobu, and Ken Schiruhn, *Sociology for Twenty First Century* (USA: Prentice Hall, 1996), h. 310-312.

keagamaan tradisional tidak berperan sebagaimana harapan ideal masyarakat, dan (4) kecenderungan praktis-pragmatisme masih ada dalam tubuh umat Islam, maka selama itu pula potensi muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan sempalan tetap ada.

Selama keempat faktor di atas masih ada, maka juga akan berimplikasi pada: *pertama*, ada aliran keagamaan yang bertahan dengan baik di wilayah tertentu, ada juga yang muncul kemudian menghilang begitu saja; *kedua*, ada aliran keagamaan yang berpotensi membentuk agama baru. Dalam proses ini akan selalu ada *truth claim* dan dominasi kebenaran dan aliran keagamaan yang telah mapan, pada saat yang sama aliran keagamaan baru akan terus berjuang melakukan pergulatan posisional dan harus ikut serta mendefinisikan kebenaran, sehingga terjadi –meminjam istilah Geertz *struggle for the real*.

Meskipun demikian, penanganan terhadap gejala muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan tidak perlu membuat umat Islam bersikap reaktif-emosional, akan tetapi sebaiknya mengembangkan pendekatan filosofis dan argumentasi yang rasional guna meyakinkan para penganut aliran-aliran keagamaan dengan menunjukkan kekeliruan (baca: kesesatan) yang terdapat pada ajarannya. Oleh karena itu, mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan perlu dilakukan upaya-upaya dalam dua tataran sekaligus, yaitu tataran akademik dan tataran praktis.

Pada tataran teoritis-akademik, sejumlah upaya telah dilakukan ulama dalam rangka mengatasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan. Upaya-upaya tersebut umumnya bersifat pembelaan terhadap ajaran Islam yang *mainstream*, dengan menegaskan kesesuaian antara ajaran pokok sebagaimana dalam al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi, memperkuat dengan argumentasi naqliyah dan aqliyah, sekaligus menunjukkan kelemahan argumentasi yang terdapat pada sejumlah aliran-aliran keagamaan.

Pada tataran praktis, upaya untuk membendung penyebaran aliran-aliran keagamaan sempalan adalah dengan memahami dengan baik realitas masyarakat di mana ajaran tersebut berkembang. Oleh karena itulah maka diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat muslim tentang aspek-aspek ajaran Islam. Gambaran terdahulu menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan agama dan kecenderungan praktis-pragmatisme dalam menjalankan ajaran agama turut memberi kontribusi peningkatan jumlah penganut/pengikut aliran/gerakan keagamaan sempalan.

Menyadari rendahnya tingkat pendidikan seiring munculnya kesadaran akan pentingnya peningkatan pengetahuan di bidang agama dan kecenderungan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan pembangunan di bidang peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, muncul fenomena sosial keagamaan dalam bentuk lain. Di tengah masyarakat muncul inisiatif

sempalan adalah tuntutan umat. Sebagai alumni dan individu yang berkecimpung di Perguruan Tinggi Islam, saya melihat bahwa hal ini sangat mungkin karena didukung oleh minimal tiga hal: *pertama*, Kementerian Agama, cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di bawah kepemimpinan yang baru memiliki komitmen kuat mewujudkan institusi ini sebagai institusi yang terdepan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan kehidupan keberagaman; *kedua*, kebijakan umum pembangunan di bidang keagamaan yang berobsesi mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan keberagaman; *ketiga*, selama ini antara pemimpin organisasi-organisasi sosial keagamaan dengan Pemerintah terjalin hubungan yang harmonis --baik individual maupun institusional--, besar harapan umat semoga sinergitas antara pemimpin umat dan Pemerintah dalam menyusun langkah dan program pembinaan kehidupan keberagaman yang lebih baik dan pemberdayaan institusi-institusi keagamaan dalam membendung perkembangan aliran-aliran keagamaan sempalan.

